

**PRAKTIK PENGALIHAN UTANG MENURUT HUKUM ISLAM
DAN FATWA DSN NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 DI PT. BPRS
LANTABUR TEBUIRENG CABANG GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Frida Milani

NIM: C02214005



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

SURABAYA

2019

**PRAKTIK PENGALIHAN UTANG MENURUT HUKUM ISLAM
DAN FATWA DSN NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 DI PT. BPRS
LANTABUR TEBUIRENG CABANG GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

FRIDA MILANI

NIM. C02214005

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Frida Milani

NIM : C02214005

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Pengalihan Utang Menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Frída Milani

NIM. C02214005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Frida Milani NIM: C02214005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Hj. Ifa Mutitul Khoiroh, S.H., M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji II

Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H
NIP. 196808262005012001

Penguji III

Dr. Sanuri, S. Ag., M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji IV

Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.H.I
NUP. 201603306

Surabaya, 06 Februari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Frida Milani
NIM : C02214005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : apridmel@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PRAKTIK PENGALIHAN UTANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 DI PT. BPRS LANTABUR TEBUIRENG CABANG GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019
Penulis


(FRIDA MILANI)

pemaparan diatas penelitian diarahkan untuk mencoba mengungkapkan bagaimana praktik pengalihan utang di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik yang akan dipaparkan secara sederhana namun mendalam dan langsung pada aspek yang diteliti. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab, dari bab satu sampai bab lima saling berhubungan, selanjutnya dalam setiap bab terdiri dari sub bab. Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan teratur sesuai dengan apa yang direncanakan penulis, maka dibutuhkan sistematika yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yaitu dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam bab ini dibahas teori-teori yang menjadi dasar pedoman tema penelitian yang diangkat. Hal ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi. Dalam bab ini berisi tentang *murābahah*, *hiwālah*, dan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

notaris di Jombang tentang pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Lantabur yang berisi perubahan susunan pemegang saham, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta perubahan nama Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Lantabur menjadi Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Lantabur dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusan No.AHU-512688.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan sekaligus dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tahun 2012 terdapat perubahan anggaran dasar sesuai dengan akta No. 101 tanggal 28 Maret 2012 dibuat notaris Eka Listianawati, S.H notaris di Jombang tentang pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Lantabur yang berisi merubah pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan yang bernama Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur" menjadi "PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng" dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-16377.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan salinan Keputusan

nasabah dibebankan beberapa macam biaya hingga waktu nasabah bisa melunasi pinjaman tersebut.

B. Praktik Pengalihan Utang yang Berlaku di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik

Banyak orang yang berpikiran bahwa karena perbankan syariah masih baru, jenis transaksi yang dapat dilakukan hanya sedikit. Namun yang terjadi bank syariah saat ini sangat modern. Hadirnya bank syariah membawa respon positif bagi sebagian nasabah yang ingin terlepas dari adanya bunga bank yang ada di bank konvensional yang merupakan riba. Selain nasabah ingin terlepas dari bunga bank, pada bank konvensional menerapkan sistem angsuran yang semakin besar dan ditambah jumlah bunga yang semakin meningkat. Sedangkan pada bank syariah, nasabah yang melakukan pembiayaan akan diberikan angsuran ringan yang tetap dan telah disepakati di awal.

Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik adalah pembiayaan pengalihan utang. Dalam teorinya produk ini adalah suatu produk pembiayaan pengalihan utang yang salah satunya dapat melalui akad *qard* yang diselesaikan dengan akad *murābahah*. PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik menerapkan praktik pengalihan utang dalam bentuk pengambilalihan utang melalui pemberian fasilitas *qard* kepada nasabah yang kemudian akan dikembalikan secara angsuran dengan akad *murābahah*.

- 4) Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK pengangkatan untuk PNS
 - 5) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
 - 6) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik
 - 7) Data objek pembiayaan
 - 8) Data jaminan
- b. Pengusaha perorangan
- 1) Kartu identitas calon nasabah dan istri/suami (KTP atau Pasport)
 - 2) Kartu keluarga, surat nikah
 - 3) Surat izin usaha peragangan
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 5) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
 - 6) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik
 - 7) Data objek pembiayaan
 - 8) Data jaminan
- c. Profesional
- 1) Kartu identitas calon nasabah dan istri/suami (KTP atau Pasport)
 - 2) Kartu keluarga, surat nikah
 - 3) Surat izin profesi
 - 4) Surat izin praktik
 - 5) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
 - 6) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik
 - 7) Data objek pembiayaan

bagi *muqtariḍ* yang mampu membayar hutang akan tetapi menunda-nunda pembayaran hutangnya maka itu adalah suatu kezaliman. Demikian sebaliknya, jika *muqtariḍ* belum mampu membayar hutangnya, dianjurkan bagi pihak *muqriḍ* untuk memberikan tangguhan hingga *muqtariḍ* mampu melunasinya. Setelah itu terjadi kesepakatan antara *muqriḍ* dan *muqtariḍ* mengenai perjanjian di atas dengan akad *qarḍ* dan *murābahah* yang telah disediakan dalam fasilitas pengalihan utang.

Akad kedua menggunakan akad *murābahah* yakni akad keseluruhan pembiayaan dengan melunasi akad yang pertama. Sedangkan *murābahah* sendiri adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahīb al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahīb al-māl* dan pengembaliannya secara tunai atau angsur.

3. Studi di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik

Pada skripsi ini peneliti melakukan penelitian terhadap praktik pengalihan utang dengan akad *qarḍ* dan *murābahah* yang berlaku di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan sejumlah nasabah yang melakukan pembiayaan pengalihan utang di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik, peneliti akan memberikan deskriptif tentang suatu peristiwa nasabah pembiayaan pengalihan utang yang terurai sebagai berikut:

Bapak Nur bekerja sebagai jasa tukang kayu, ia baru pertama melakukan pengajuan pembiayaan pengalihan utang, tanpa mengetahui berapa biaya pelunasan di bank lama tempat Bapak Syam mempunyai kredit, tetapi hanya mengajukan pembelian rumah milik Bapak Syam. Karena setelah melakukan angsuran beberapa tahun Bapak Syam sudah tidak sanggup untuk mengangsur kreditnya setiap bulan di bank lama. Akhirnya Bapak Syam menjual rumah tersebut ke Bapak Nur. Untuk harga pasaran rumah adalah Rp. 400,000,000 dan sudah dibayar oleh Bapak Nur sejumlah Rp. 100,000,000 sebagai bukti pembayaran ke pemilik rumah.

Setelah itu, PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik memproses pembiayaan pengalihan utang untuk pembelian rumah yang diajukan oleh Bapak Nur sejumlah Rp. 300,000,000 dengan melakukan analisis dan survey. Karena Surat Hak Milik masih di bank lama maka harus dilunasi terlebih dahulu hutang/kreditnya. Kemudian, pihak BPRS membuatkan akad sementara yakni akad *qard*. Pencairan akad *qard* sejumlah Rp. 170,000,000 dengan jangka waktu 7 hari. Setelah sertifikat atau asset masuk ke PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik harus didaftarkan dan diurus di notaris. Lalu dibuatkan akad *murābahah* dan dilakukan pencairan kedua yakni sejumlah Rp. 125,500,000 yang diterima oleh Bapak Nur, sedangkan Rp. 4,500,000 nya dipotongkan untuk biaya admin. Kemudian kewajiban Bapak Nur adalah melunasi pembiayaan tersebut secara angsuran setiap bulan sejumlah Rp.

dipandang sebagai akad *murābahah*, karena akad terakhir ini yang ditunjukkan oleh maksud dan makna dari pembuatan akad.

Akad *murābahah* dalam pengalihan utang yang dilakukan oleh PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik, adalah sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan dari akad sebelumnya yaitu *qard*. Karena Akad *murābahah* di sini berfungsi untuk melanjutkan pelaksanaan *qard*, sebab akad *qard* tidak mungkin terlaksana apabila salah satu pihak tidak menyepakati akad *murābahah*.

Qard sebagai akad pembelian asset milik nasabah yang ada di bank/kreditur sebelumnya oleh PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik sebagai bentuk pengalihan utang. Dalam praktik perbankan lembaga keuangan syariah memberikan *qard* kepada nasabah, kemudian dengan *qard* tersebut nasabah melunasi hutang/kreditnya kepada bank sebelumnya, setelah dilunasi barang/asset sepenuhnya menjadi milik nasabah. Oleh karena itu, nasabah dapat menjual barang/asset tersebut kepada lembaga keuangan syariah secara tunai. Bagian asset yang dibeli oleh PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik adalah sejumlah sisa utang pokok nasabah di bank/kreditur sebelumnya.

Setelah PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik membeli asset nasabah dari bank/kreditur sebelumnya dengan akad *qard*, maka asset tersebut dijual kembali oleh nasabah kepada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik untuk melunasi *qard*-nya, kemudian PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik menjualnya lagi kepada nasabah dengan menggunakan akad *murābahah*. Dalam akad ini, pihak BPRS merinci total asset yang dibelinya,

kemudian menentukan margin keuntungan dan bentuk pembayarannya secara angsuran sesuai dengan analisa kemampuan bayar nasabah.

Pada praktiknya, PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik untuk akad-akad yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, dimana ketika nasabah mengajukan pembiayaan pengalihan utang nasabah harus menandatangani persetujuan pembiayaan yang di dalamnya terdapat akad *qard* dan akad *murābahah* yang harus diketahui oleh kedua belah pihak. Setelah aset nasabah (*muqtariq*) sepenuhnya dikuasai PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik (*muqrid*), kemudian *muqrid* menjualnya kepada *muqtariq* dengan menggunakan akad *murābahah*. Akad ini tidak termasuk dalam kategori satu transaksi dua akad yang oleh sebagian ulama fiqh diharamkan. Di sini akad *qard* terpisah dengan akad *murābahah*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan tertuang dalam bab sebelumnya kepada dua nasabah PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik, bahwa limit pembiayaan yang dilakukannya di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik tersebut merupakan sisa utang dari bank / kreditur sebelumnya. PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik tidak mengambil keuntungan dari akad *qard*, akan tetapi ada biaya administrasi yang timbul untuk biaya perlengkapan yang dipotongkan dari sejumlah pencairan pembiayaan yang diajukan nasabah. Sejumlah biaya lain-lain yang dipotongkan dari pencairan kedua pada akad *murābahah*. Begitu juga pada nasabah pertama yang akad *murābahah*-nya untuk tambahan modal usaha. Dalam hal ini, setelah pelunasan

pembiayaan yang berasal dari bank/kreditur sebelumnya yang dialihkan oleh PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik dengan menggunakan *qard*. Akad *qard* di sini sebagai pelunasan ke bank/kreditur sebelumnya dihitung berdasarkan sisa utang pokok dan dilunasi pembayarannya oleh nasabah di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik dengan akad *murābahah*.

Namun, terdapat ketidaksesuaian pada praktik yang terjadi di lapangan, yakni terdapat potongan biaya lain-lain yang diambilkan dari pembiayaan tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang, yang di dalamnya tidak terdapat penjelasan pembiayaan pengalihan utang untuk modal kerja.

Pada kasus nasabah pertama, dalam Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 alternatif I akad *qard* yang diberikan bank kepada nasabah untuk pengalihan utang biaya tersebut tidak dilunasi oleh nasabah, akan tetapi dipotongkan dalam pembiayaan *murābahah*.

Dalam fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tidak terdapat penjelasan mengenai potongan di antara kedua akad. Jika dipotongkan dari akad *murābahah*, maka pada pencairan kedua tersebut uang yang diterima nasabah berkurang. Sedangkan dalam pengalihan utang pada kasus nasabah pertama ini potongan tersebut sebagai pembayaran sertifikasi di notaris.

Kemudian pada akad *murābahah*, dalam fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 dijelaskan bahwa akad tersebut digunakan untuk pembelian barang/asset, akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah *murābahah*

digunakan untuk tambahan modal usaha. Berbeda dengan nasabah kedua, yang pembiayaan pengalihan utangnya benar-benar untuk pembelian asset.

2. Analisis Prespektif Hukum Islam

PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik merupakan lembaga keuangan milik pemerintah yang operasionalnya berlandaskan pada prinsip syariah. PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik bertujuan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perkembangannya, semakin banyak produk-produk yang dimiliki PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya yaitu pembiayaan pengalihan utang. Pengalihan utang dalam praktiknya di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik menggunakan akad *qard* dan *murabahah* yang mana akad tersebut sebagai akad pengalihan hutang sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

Pengalihan utang dalam hukum Islam yang disebut dengan *hiwālah*, secara umum *hiwālah* terbagi menjadi dua macam yakni *hiwālah muṭlaqah* dan *hiwālah muqayyadah*. *Hiwālah muṭlaqah*, yaitu pengalihan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang *muḥīl* (pihak pertama) kepada *muḥāl* (pihak kedua). Sedangkan *hiwālah muqayyadah*, yaitu pengalihan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang *muḥīl* (pihak pertama) kepada *muḥāl* (pihak kedua).

- b. Objek akad/*ma'qūd 'alaih, ma'qūd 'alaih* ini sesuai barang yang halal serta jelas ukuran, jenis, dan jumlahnya. Praktik yang terjadi di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik pada nasabah pertama objeknya berupa tambahan modal usaha berupa sejumlah uang Rp. 50,000,000, dan pada nasabah kedua adalah untuk pembelian rumah di daerah Surabaya dengan harga pasaran Rp. 300,000,000.
- c. Harga barang/*thaman*, dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas. Pihak BPRS memberitahukan total plafond pembiayaan berdasarkan pengajuan pembiayaan oleh nasabah dan disesuaikan dengan harga pasaran ditambah dengan margin keuntungan. Kemudian, untuk pembayaran/pelunasannya bisa diangsur sesuai analisa kemampuan bayar nasabah.
- d. *Ṣighat*, ijab dan qabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat berakad. Dalam *Ṣighat* harus jelas harga barang, siapa pihak yang menggunakan dana pembiayaan atau yang berakad dan jika BPRS mewakili pembelian barang kepada nasabah harus jelas siapa yang mewakili, begitu juga dalam jaminan yang diajukan nasabah dalam pembiayaan. Disebutkan bahwa harga barang pada nasabah pertama sejumlah Rp. 50,000,000 dan nasabah kedua Rp. 300,000,000. Pada kedua nasabah ini berupa sertifikat rumah.

Setelah nasabah melunasi hutangnya di bank/kreditur sebelumnya, kemudian dilakukan pencairan kedua pada akad *murābahah*. Pencairan kedua ini merupakan sisa dari plafond pembiayaan yang telah dikurangi untuk pelunasan hutangnya dengan *qard* tersebut dan biaya lainnya. Jika dilihat dari praktik yang terjadi pada nasabah pertama, biaya-biaya ini dipotongkan dari pencairan kedua yakni pada akad *murābahah*. Dimana seharusnya uang tersebut termasuk dalam biaya modal usahanya dan apabila seperti itu membuat nasabah tidak menerima seutuhnya uang dari pembiayaan tersebut.

Murābahah pada dasarnya merupakan akad yang menerapkan prinsip jual beli. Menurut Sutan Remy, lembaga pembiayaan syariah melakukan pembelian barang yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga pembiayaan syariah tersebut, maka selanjutnya lembaga pembiayaan syariah tersebut menjual barang tersebut kepada nasabah.⁴ Namun studi pada nasabah pertama, *murābahah* digunakan untuk tambahan modal usaha. Dalam pelaksanaannya pihak PT. BPRS Lantabur Cabang Gresik memberikan uang tersebut sebagai kuasa untuk dibelikan barang-barang dagangannya. Namun, pada dasarnya akad yang biasa digunakan untuk pembiayaan modal usaha adalah akad *muḍārabah* dan *mushārahah*.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 191.

- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Munawar (al), Said Agil Husein. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani. 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Nawawi (al), Yahya bin Syarf. *al-Minhaj*. Juz I (*Digital Library. al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Sānī*). 2005.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya. 2010.
- Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2016.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media. 2014.
- Purwanto, Adi. "Analisis Implementasi *Take Over* pada Hunian Syariah (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto)" Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. 7, Bandung: Alfa Beta, 2008
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. III. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004.
- Sutarsih, Farida. "Desain Akad Pembiayaan *Take Over* KPR Syariah di Bank Muamalat Indonesia" Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2008.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Wawancara*. M. Iskandar Dz. Gresik, 05 September 2018
- Wawancara*. Ma'rifatul Ulya. Gresik, 09 September 2018
- Wawancara*. Musta'in. Gresik, 08 September 2018

